

Rabu, 16 Mei 2012

BERKAT
BERITAKHATULJSTIWA

Bansos KONI Tunggu Audit BPK

Pontianak, BERKAT.

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyatakan masih menunggu hasil audit BPK untuk penuntasan kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial Komite Olahraga Nasional Indonesia (Bansos KONI) Kalbar senilai Rp 22,14 miliar. Hingga kini, penanganan kasus belum tuntas meski pengusutannya sudah berjalan sejak 2009 silam. Bahkan sebelum kembali diambil alih Polda Kalbar, kasus pernah ditangani KPK-RI.

"Kita masih menunggu hasil audit BPK," ujar Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar, Selasa (15/5) di Pontianak.

Menurut dia, persyaratan yang diminta BPK untuk mendapatkan hasil audit sudah dilengkapi dan diserahkan. Salah

satunya dengan melengkapi keterangan saksi beberapa waktu lalu. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Pengda PSSI dan mantan Ketua Umum KONI Kalbar waktu lalu yakni Zulfadli dan Usman Jafar. Dimana keduanya kini menjabat sebagai anggota DPR-RI dapil Kalbar.

Sementara dalam kasus Bansos KONI, Polda telah menetapkan seorang tersangka. Yaitu mantan wakil bendahara KONI, Iswanto. Munculnya kasus Bansos ini bermula dari hasil audit regular yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008. Termasuk audit dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008.

Alhasil, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opin-

ion (DO) terhadap laporan keuangan tersebut. Penyebab DO, dikarenakan BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya. Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDDT).

Dari hasil penelitian PDDT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK. Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah. Keempat item itu adalah temuan dana Bansos untuk KONI

Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar.

Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Prapon sebesar Rp 1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar.

Serta yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 dan terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar. (del)